



KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA TAHUN 2025**



**PERATURAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 024 /KEP/DPPKB/2026

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang** : a. bahwa dokumen Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Teknis Operasional dan merupakan penjabaran teknis Renstra Perangkat Daerah untuk setiap unit kerja yang memuat Visi, Misi serta Arah Kebijakan teknis;
- b. bahwa mengingat sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan....

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- m. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Permendagri 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
- q. Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
- r. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030;
- X Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
- y. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- z. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman;
- aa. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;
- ab. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021P sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2006-2025;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

BAB II
SISTEMATIKA RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

Lampiran Renja

Pasal 3.....

Pasal 3

Isi dan uraian Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini.

Pasal 4

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 merupakan pedoman seluruh Komponen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 17 Oktober

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Drs. H. AZWARMAN,MM
NIP. 196706041992031006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Pariaman, 17 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Drs. H. AZWARMAN, MM
NIP. 196706041992031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	66
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	77
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	79
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	99
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	101
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	100
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	102
3.3. Program dan Kegiatan	108
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	133
BAB V PENUTUP	203

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-based management*), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar

untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh

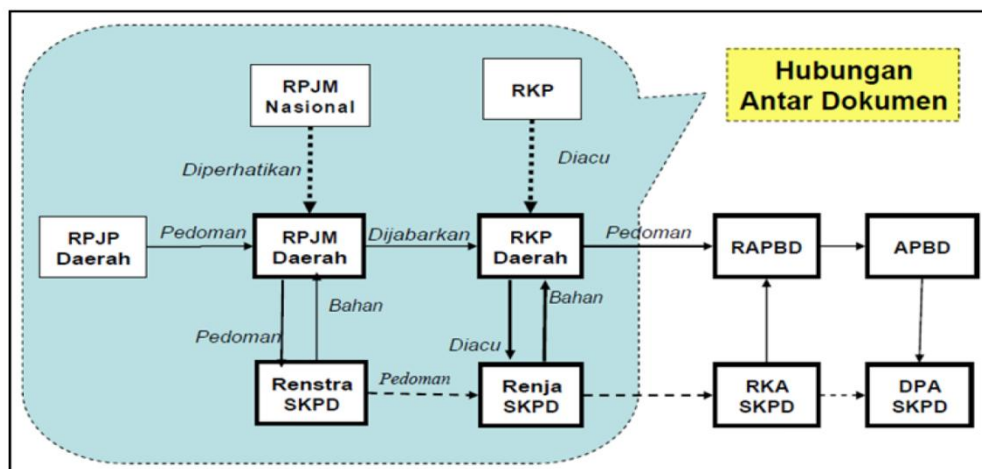
perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPJMD adalah penyalarsan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat

berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian

anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2025) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

- 2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

b. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

c. Program Pembinaan Keluarga Berencana

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

d. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Pengendalian Penduduk		30,00	28	93,3	%	Rp.477.167.800	Rp.454.313.640	95,21
		100,00	85	85	%			
		3.7	2.3	62,1	Angka			
		85,00	78,00	91,7	%			
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		1,00	0 perbup	0	Perbup	Rp.118,967,800	Rp.115,700,600	97,25
		11,00	11 kerjasama	100	Kerjasama			
1	Jumlah Organisasi yang mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	44,00	40 organisasi	90,9	Organisasi	2,530,000	2,530,000	100
2	Jumlah Organisasi yang mengikuti sosialisai tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	44,00	41 organisasi		Organisasi	1,300,000	0	0

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		66.25	65.91	99,4	%	Rp.4,813,198,000	Rp.4,674,648,579	97,12
		66.25	65.91	99,4	%			
		11.5	15.54	100	%			
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		84	80 kali	95,2	kali	Rp.1,767,728,000	Rp.1,742,535,390	98,5
		17	17 kali	100	kali			
		352	348 orang	98,8	orang			
1	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	44,00	42 organisasi	95,4	organisasi	210,528,000	198,720,000	94,39
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		0,90	87,00	96,6	%	2,037,310,000	2,013,396,400	98,8
		23.5	0	0	Tahun			
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		99	96 kelompok	96,9	Kelompok	393,010,000	369,396,400	93,9
1	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	68,00	59 kelompok	86,7	Kelompok	7,000,000	6,232,000	89,0

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Pengendalian Penduduk
 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Program Pembinaan Keluarga Berencana
 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- d. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100,00	100,00	100	%	Rp.3.481.461.411	Rp.3.349.830.227	96,21
		B	B	100	Nilai			
		100,00	100,00	100	%			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3,00	3,00	100	Dokumen	Rp.39.050.000	Rp.36.626.534	93,79
		3,00	3 Laporan	100	Laporan			

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	3 Dokumen	100	Dokumen	16.340.000	14.876.605	91,04
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3 Laporan	100	Laporan	22.710.000	21.749.929	95,77
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15,00	15 Laporan	100	Laporan	3.240.026.411,00	3.121.937.380	96,35
1	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29,00	29 orang	100	orang	3.119.706.411	3.004.577.380	97,06
2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	12 dokumen	100	Dokumen	120.320.000	117.360.000	96,80
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah....		250,00	245 surat	98	surat	Rp. 59.859.000	Rp. 58.242.634	97,29
		3,00	3 pelayanan	100	pelayananan			
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,00	4	100	Paket	7.439.000	7.417.285	99,66
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100	Laporan	860.000	847.000	98,48
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	12 laporan		Laporan	51.560.000	49.978.349	96,93
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	12	100	Kali	167.833.500	153.508.600	91,46
		12	12	100	Kali			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	Laporan	51.276.000	50.820.180	99,11
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100	Laporan	60.500.000	51.927.249	85,83
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	Laporan	9.750.000	9.319.600	95,58
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8820,00	1470,00	16,66	objek	21.000.000	14.783.000	70,39
		13504559240	13504559240,00	100	nilai (Rp)			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	4	4	100	Unit	21.000.000	20.956.650	99,79

	Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan							
Program Pengendalian Penduduk		30,00	28	93	%	Rp. 477.167.800	Rp. 454.313.640	95,21
		100,00	85	85	%			
		3.7	2.3	62,16	Angka			
		85,00	78,00	92	%			
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		1	0	0	Perbup	Rp. 118.967.800	Rp. 115.700.600	97,25
		11	11	100	Kerjasama			
1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1,00	1	100	Dokumen	4.160.000	4.160.000	100
2	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1	1	100	Dokumen	6.750.000	6.631.200	98,24
3	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1	1	100	Dokumen	6.000.000	5.674.400	94,57
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		17	17	100	Kecamatan	358.200.000	338.613.040	92,47
3	Pencatatan dan Perkumpulan Data Keluarga	17	17	100	Laporan	94.200.000	94.200.000	100
4	Pengolahan dan Pelaporan Data	12	12	100	Dokumen	264.000.000	244.413.040	92,58

	Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		66.25	65.91	100	%	4.813.198.000	4.674.648.579	97,12
		66.25	65.91	100	%			
		11.5	15.54	100	%			
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		84	80 kali	95	kali	1.767.728.000	1.742.535.390	98,57
		17	17 kali	100	buah			
		352	348 orang	98	orang			
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4	4	100	Dokumen	12.000.000	11.886.000	99,05
2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	4	100	Dokumen	250.000.000	249.196.250	99,67
3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	12	100	Laporan	287.000.000	283.358.400	98,73
4	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	1	1	100	Laporan	843.200.000	839.742.740	99,58
5	Pengendalian Program KKBPK	12	12	100	Laporan	165.000.000	159.632.000	96,7
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		23	23	100	orang	372.472.000	372.122.317	99,90
1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	4	4	100	Organisasi	45.472.000	45.446.617	99,90
2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20	20	100	Orang	327.000.000	326.675.700	99,90
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan		250	248 kali	99	Kali	2.085.948.000	1.994.138.672	95,59
		60	60 faskes	100	Faskes			

KB Di Daerah Kabupaten/Kota		2	2 unit	100	Unit			
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	12	100	Laporan	32.300.000	32.230.000	99,78
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1375,00	1375,00	100	Orang	605.529.000	605.500.450	99,99
3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4	4	100	Dokumen	5.000.000	4.980.280	99,60
4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2	2	100	Unit	1.099.624.000	1.012.760.922	92,10
5	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	12	100	Laporan	319.495.000	314.727.020	98,50
6	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	1	100	Laporan	14.000.000	14.000.000	100
7	Peningkatan Kesertaan KB Pria	14	6	42	Orang	10.000.000	9.940.000	99,40
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		4	4 organisasi	100	organisasi	587.050.000	565.852.200	96,38
		3	3 organisasi	100	organisasi			
1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4,00	4 organisasi	100	Organisasi	16.000.000	15.980.000	99,87
2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4,00	4 dokumen	100	Dokumen	27.750.000	23.968.000	86,37

3	Pembinaan Terpadu Kampung KB	15,00	15 Laporan	100	Laporan	258.281.251	240.885.451	93,35
4	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	22,00	22 kampung kb	100	Kampung KB	285.018.749	285.018.749	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		90	87	96	%	2.037.310.000	2.013.396.400	98,82
		23,5	22,5	95	Tahun			
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		99	96	96	Kelompok	393.010.000	369.396.400	93,99
1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25	25	100	unit	300.000.000	291.276.000	97,09
2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50	50	100	Laporan	8.000.000	7.248.400	90,60
3	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35	35	100	Orang	8.000.000	7.248.400	90,60
6	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4	4	100	Laporan	65.000.000	64.640.000	99,44
Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui		261,00	261,00	100	Orang	1.644.300.000	1.644.000.000	99,98

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga								
1.	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	261,00	261 orang		Orang	861.300.000	861.300.000	100
2.	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	783,00	783 orang		Orang	783.000.000	782.700.000	99,96

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra

Tidak ada Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Komitmen Bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama mitra kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- Adanya Perencanaan Kegiatan dan Koordinasi yang baik.
- Upaya yang maksimal dalam peningkatan kinerja pelaksanaan renja sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- Penetapan target yang tepat sehingga kinerja dapat dicapai.

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- Kurangnya Sumber daya Manusia (SDM) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai.

- c. Perencanaan target kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga masih membutuhkan perubahan dan penyesuaian.
- d. Lambatnya Penyaluran Dana BOKB.
- e. Masih kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Dinas dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.
- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2026, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2026 juga dapat mempengaruhi

kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.

- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026. Jika Dinas tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026. Ini akan membantu Dinas dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

- b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih

berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Dinas mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Dinas dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2026. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	B		B	B	100%	B		
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen		
		2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sesuai aturan dan tepat waktu	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan		
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen		
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-		
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-		

		Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-		
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-		
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan		

		Kinerja SKPD								
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan		
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	32 Orang	34 Orang	34 Orang	100%	29 Orang		
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen		
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan		3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan		

2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	27 Orang	12 Orang	27 Orang	15 Orang	62 %	27 Orang		
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala		8 Orang	10 orang	5 orang	50 %	15 Orang		
		Jumlah SKP ASN		32 Orang	33 Orang	33 Orang	100%	29 Orang		
2.14.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-			-	-		
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	-			-	-		
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistrib	250 surat	235 surat	250 surat	223 surat	89.20%	250 surat		

		usi sesuai tujuan								
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	3 pelayanan	3 pelayanan	3 pelayanan	3 pelayanan	100%	3 pelayanan		
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket		
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket		
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.14.01.2.06.08		Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu								
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	100%	12 Laporan		
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali		
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan		12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 Kali		
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		

2.14.01.2.08.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	1470 objek	1380 objek	1470 objek	1350 objek	91%	1470 objek		
		Jumlah total nilai aset	Rp.13.504.559.240	Rp.12.280.400.000	Rp.13.504.559.240	Rp.12.289.148.908	91%	Rp.13.504.559.240		
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	-		

2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Kendaraan Operasional Lapangan atau Biaya Pajak, Perizinan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit	-	4 Unit		
2.14.01.2.09.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan					-			
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit		
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun	30%	15%	30%	26%		30%		

		dan memanfaatkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)					83%			
		Persentase indikator pengendalian kuantitas penduduk dengan kategori berhasil	100%	100%	100%	87%	87%	100%		
		Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	3.7 per1000	2.34 per1000	3.7 per1000	3.18 per1000	118.4%	3.7 per1000		
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	85 %	75 %	80 %	72 %	90%	85 %		
2.14.02.2.01	Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kebijakan Daerah dalam	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Perturan Kepala Daerah) yang	1 perbup	1 perbup	1 perbup	1 perbup	100%	1 perbup		

	rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk								
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	11 Kerjasama	8 Kerjasama	11 Kerjasama	8 Kerjasama	80%	11 Kerjasama		
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-		
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		

	Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	n Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					100%			
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan					-			
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen		
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen		

2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta	44 Organisasi	-	-	-	-	44 Organisasi		

		Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan								
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	44 organisasi	32 organisasi	44 organisasi	38 organisasi	86%	44 organisasi		

2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Pengendalian KKBP	Rapat Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan		
2.14.02.2.02	Pemetaan Pengendalian Penduduk Daerah Kabupaten/ Kota	Perkiraan Cakupan Kecamatan yang mengupdate data kependuduk an tepat waktu.	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	100%	17 Kecamatan		
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependuduk an yang Dirumuskan	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A		
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependuduk an, Keluarga Berencana dan Pembangun an Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A		
2.14.02.2.02.04		Jumlah Dokumen Pemetaan	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A		

	Pemetaan Kependudukan	Kependudukan								
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A		
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah orang yang tersosialisasi tentang Pengendalian Total Fertility Rate (TFR)	30 Orang	38 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang		
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	22 Rumah data	-	-	-	-	-		
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan		-	-	-		-		

	Sistem Informasi Keluarga	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					-			
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		17 Data	-	-	-	-		
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpul Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Program KKBPK	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A		

2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber KB	66.25%	65.29%	66.00%	65.89%	99.83%	66.25%		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66.25%	65.29%	66.00%	65.89%	99.83%	66.25%		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11.5%	16.5%	11.75%	15.72%	74%	11.5%		
		Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang berkomitmen terhadap program KKBPK dan stunting	85%	-	80%	80%	100%	85%		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pengendalian Penduduk dan KB	84 kali	75 kali	83 kali	78 kali	94%	84 kali		

	dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	sesuai Kearifan Budaya Lokal								
		Jumlah media promosi pengendalian penduduk dan KB yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat	17 Buah	17 Buah	17 Buah	17 Buah	100%	17 Buah		
		Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	352 orang	327 orang	346 orang	318 orang	92%	352 orang		
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	44 organisasi	32 organisasi	44 organisasi	35 organisasi	80%	44 organisasi		

		kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan					-			

		Keluarga Berencana)								
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	90%	12 Dokumen		

2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
-----------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------	------------	--	--

2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdaya guna	23 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	100%	23 Orang		

2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	44 Organisasi	32 Organisasi	44 Organisasi	44 Organisasi	100%	44 Organisasi		
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		-			-			
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 Orang	18 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	250 kali	230 Kali	250 kali	250 kali	100%	250 kali		

	KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan								
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	60 Faskes	44 faskes	44 Faskes	44 Faskes	100%	60 Faskes		
		Jumlah Sarana penunjang yang diadakan untuk pelayanan KB dan sarana pendistribusi an alat dan obat kontrasepsi	2 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalia n Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		

		Jaringan dan Jejaringnya								
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1375 Orang	1320 Orang	1375 Orang	1375 Orang	100%	1375 Orang		
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	13 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit		
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
2.14.03.2.03.09		Jumlah Orang yang	25 orang	72 orang	75 orang	75 orang		25 orang		

	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan					100%			
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Berencana dan Kesehatan Reproduksi					-			
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan	14 orang	10 orang	14 orang	8 orang		14 orang		

		Kesetaraan KB Pria					95			
2.14.03.2.03.16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang		
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	44 Organisasi	32 Organisasi	44 Organisasi	34 Organisasi	77%	34 Organisasi		
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan serta dalam meningkatkan kualitas Pelayanan KB	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	100%	3 Organisasi		

2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	44 Organisasi	32 Organisasi	44 Organisasi	34 Organisasi	77%	44 Organisasi		
2.14.03.2.04.01	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.14.03.2.04.02	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		

2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	22 Kampung KB	22 Kampung KB	22 Kampung KB	22 Kampung KB	100%	22 Kampung KB		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKA yang dibina	90%	80%	85%	80%	94%	90%		
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23.5 Tahun	25.5 Tahun	23 Tahun	25.2 Tahun	92%	23.5 Tahun		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi yang	99 Kelompok	80 Kelompok	98 Kelompok	72 Kelompok		99 Kelompok		

		melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga					93%			
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	68 Kelompok	58 Kelompok	68 Kelompok	68 Kelompok	100%	68 Kelompok		

2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Unit	-	-	-	-	25 Unit		
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		

2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35 Orang	32 Orang	35 Orang	35 Orang	100%	35 Orang		
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 Orang	11 Orang	50 Orang	43 Orang	86%	50 Orang		

2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68 Kelompok	58 Kelompok	68 Kelompok	65 Kelompok	96%	68 Kelompok		
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		

	Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					100%			
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					-			
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok tim pendamping keluarga yang berperan serta dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	261 orang	-	-	-	-	261 orang		

2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A		
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A		

		Pemberdaya an Ekonomi Keluarga/UP PKS)								
2.14.04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko stunting (Termasuk remaja calon penganten/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta, balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting ((Termasuk remaja calon penganten/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta, balita)	783 Orang	-	-	-	-	783 Orang		
2.14.04.2.02.06	Pendampingan keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon penganten/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta, balita)	Jumlah keluarga beresiko stunting (Termasuk remaja calon penganten/calon PUS, Ibu hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta, balita)	261 Orang	-	-	-	-	261 Orang		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 65 Tahun 2021 tentang SOTK, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan :
 - 1. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
 - 2. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
- b). Sasaran :
 - 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat
 - 2. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate/TFR

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.7	1.7	1.7	1.7	1.73	1,72	1.72	1.70	IKU DAERAH
2.	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	2.1	2.0	2.0	2.0	1.89	2,2	2.0	2.0	IKU OPD
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	15	17	19	22	22.72	100	25	27	
4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	30	35	40	45	30	100	30	30	
5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	2	3	4	0	0	1	1	
6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	6	8	10	12	6	8	7	9	
7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan	7	10	12	15	3	11	3	5	

	formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan									
8.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2.4	2.3	2.2	2.1	1.21		1.21	1.21	
9.	Ratio Akseptor KB	Ratio Akseptor KB	66	66.25	66.5	66.75	65.89	65,91	66.00	66.25	IKU OPD
10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	66	66.25	66.5	66.75	65.89	65,91	66.00	66.25	
11.	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	3.9	3.9	3.6	3.5	3.18	2,32	3.18	3.10	IKU OPD
12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	23	24	25	26	0	0	0	15	
13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	11.75	11.5	11.25	11	15.72	15,54	14.25	14.00	
14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25	25.15	25.25	25.5	16.75	25,13	19.80	22.00	
15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	34.9	35	35.15	35.25	27.91	27,81	28.30	30.20	
16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	51.62	52.12	52.62	53.16	45.43	67,95	49.76	50.00	
17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	41.86	42.36	42.86	43.36	15.12	21.70	25.87	30.12	
18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	40.97	41.47	41.97	42.47	4.69	6,17	4.69	4.69	
19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	447	458	470	482	82.35	111,76	82.35	82.35	

20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling remaja/Mahasiswa	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling remaja/Mahasiswa	358	370	382	394	411.76	417,64	411.76	411.76	
21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	23	40	45	51	23	100	25	28	
22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	44.57	44.67	44.77	44.87	0	1,24	25.23	28.54	
23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	495	9.7	9.7	
24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	96.94	88,78	100	100	
25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	50	50,4	100	100	
26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	35	40	45	50	35	100	40	45	
27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	24	26	28	30	0	0	0	0	
28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	72	72.5	73	73.5	0	0	0	0	

29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	63.54	64.04	64.54	65.04	0	0	0	0	
30.	Rata -rata usia kawin pertama wanita	Rata -rata usia kawin pertama wanita	23	23.5	24	24.5	25.23	22,5	25.00	25.00	
31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0.15	0.16	0.17	0.18	0.76	0,17	0.76	0.76	

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk	1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Nilai	2,0	2,26	87	Cukup Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Perangkat Daerah	1	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	%	A	A	100	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Hasil Penilaian Evaluasi Sakip DPPKB dari Inspektorat
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

I. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan DPPKB

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
		1	INDIKATOR KINERJA UTAMA					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	A	A	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat terlihat Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 realisasinya mencapai 100% dengan nilai A dan interptretasi Sangat Berhasil. Nilai SAKIP yg berhasil diperoleh adalah A dengan nilai absolut 80,35. Hal ini membuktikan kesuksesan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Sasaran Strategis ke 4 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja dengan indikator sasaran Hasil penilaian evaluasi SAKIP.

II. Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
			INDIKATOR KINERJA UTAMA					
1.	Meningkatkan Implementasi Pembangunan Pengendalian Penduduk		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	Angka	2,0	2,26	87	Cukup Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas maka capaian indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) Kabupaten Padang Pariaman lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 2,26 %. Semakin menurun angka TFR berarti semakin berhasil upaya pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman untuk menekan angka kelahiran. TFR merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara yang disebut dengan istilah penduduk tumbuh seimbang, TFR yang berada dibawah angka 2,1 maka penduduk cenderung akan mengalami penurunan jumlah, namun jika TFR lebih dari 2,1 maka akan terjadi pertumbuhan penduduk. Capaian kinerja indikator persentase Total Fertility Rate ini bisa diinterpretasi dengan kategori Cukup Berhasil (87%).

Target belum tercapai semaksimal mungkin untuk itu perlu peningkatan kesertaan ber KB dan PUS melalui pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan KB serta meningkatkan kerjasama dengan mitra/organisasi terkait dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB. Disamping itu telah dilakukan Upaya-upaya untuk pencapaian indikator ini adanya peningkatan penggunaan alat kontrasepsi seperti IUD, Implant, pil, kondom, suntik dan telah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi KB, bertambahnya PUS yang ber-KB, pembinaan pada kelompok remaja serta pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan dengan peningkatan pembinaan pada kelompok Bina Keluarga, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.7	1.7	1.7	1.7	1.73	1,72	1.72	1.70	IKU DAERAH
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2.1	2.0	2.0	2.0	1.89	2,2	2.0	2.0	IKU OPD
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	15	17	19	22	22.72	100	25	27	
4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	30	35	40	45	30	100	30	30	

5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	2	3	4	0	0	1	1	
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	6	8	10	12	6	8	7	9	
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	7	10	12	15	3	11	3	5	
8	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2.4	2.3	2.2	2.1	1.21		1.21	1.21	
9	Ratio Akseptor KB	66	66.25	66.5	66.75	65.89	65,91	66.00	66.25	IKU OPD
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	66	66.25	66.5	66.75	65.89	65,91	66.00	66.25	
11	Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	3.9	3.9	3.6	3.5	3.18	2,32	3.18	3.10	IKU OPD
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	23	24	25	26	0	0	0	15	
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	11.75	11.5	11.25	11	15.72	15,54	14.25	14.00	
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25	25.15	25.25	25.5	16.75	25,13	19.80	22.00	
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	34.9	35	35.15	35.25	27.91	27,81	28.30	30.20	
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	51.62	52.12	52.62	53.16	45.43	67,95	49.76	50.00	

17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	41.86	42.36	42.86	43.36	15.12	21.70	25.87	30.12	
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	40.97	41.47	41.97	42.47	4.69	6,17	4.69	4.69	
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	447	458	470	482	82.35	111,76	82.35	82.35	
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling remaja/Mahasiswa	358	370	382	394	411.76	417,64	411.76	411.76	
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	23	40	45	51	23	100	25	28	
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	44.57	44.67	44.77	44.87	0	1,24	25.23	28.54	
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	495	9.7	9.7	
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	96.94	88,78	100	100	
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	50	50,4	100	100	
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	35	40	45	50	35	100	40	45	

27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	24	26	28	30	0	0	0	0	
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	72	72.5	73	73.5	0	0	0	0	
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	63.54	64.04	64.54	65.04	0	0	0	0	
30	Rata -rata usia kawin pertama wanita	23	23.5	24	24.5	25.23	22,5	25.00	25.00	
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0.15	0.16	0.17	0.18	0.76	0,17	0.76	0.76	

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, dari 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan dapat mencapai target, hanya beberapa indikator saja yang belum mencapai target seperti Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS), Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dan Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Tidak tercapainya indikator tersebut karena penetapan target indikator yang kurang tepat dan tidak tersedianya beberapa data sehingga capaian tidak sesuai dengan target.

Tabel 2.8
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Indikator SPM	Target SPM Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	

1.	Total Fertility Rate /Angka Kelahiran Total	2.1	2.0	2.0	2.0	1.89	2,26	2.0	2.0	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66	66.25	66.5	66.75	65.89	65,91	66.00	66.25	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11.75	11.5	11.25	11	15.72	15,54	14.25	14.00	

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa 3 (Tiga) Indikator SPM Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana ini hanya satu indikator yang mencapai target yaitu Total Fertility Rate (TFR) hal ini disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi dan kurang tepat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari 31 indikator terdapat 11 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
 2. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 3. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
 4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
 5. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
 6. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
 7. Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
 8. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

9. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
 10. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 11. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :
1. Masih ada permasalahan yang biasanya mungkin terjadi disetiap SKPD manapun yaitu kesediaan anggaran yang belum memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan, bahkan terkadang keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam setiap pengambilan kebijakan yang akan dilakukan.
 2. Masih minimnya dana operasional terhadap kegiatan yang menyangkut event resmi kedaerahan seperti : Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan reproduksi remaja dalam bentuk rangkaian kegiatan pemilihan duta genre tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
 3. Minimnya pendanaan pada kegiatan Advokasi, KIE dan penyuluhan kepada masyarakat dan kepada PUS yang akan menjadi akseptor KB baru dan event resmi yang terpadu setiap tahun dalam meningkatkan capaian kinerja dari target program yang telah ditetapkan dalam rangka pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang bekerjasama dengan lintas sektoral seperti melalui bhakti sosial KB KES TNI dan KB KES IBI, dan KB KES PKK.
 4. Pada Unit Balai Penyuluhan Kecamatan jumlah personil di tiap Kecamatan (17 Kecamatan) rata-rata berjumlah 2 (dua) orang, bahkan ada yang 1 (satu) orang yaitu Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan saja, sementara jumlah PLKB dan PPLKB sangat kurang. Di dinas sendiri ada kepala seksi merangkap sebagai staf, sehingga kegiatan lapangan yang seharusnya dilaksanakan kasi menjadi terkendala.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPPKB	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	3.647.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPPKB	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	3.647.500.000	
			Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	B				Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	B		
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKB	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu perangkat daerah	3 Dokumen	48.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKB	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu perangkat daerah	3 Dokumen	48.000.000	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sesuai aturan dan tepat waktu	3 Laporan				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sesuai aturan dan tepat waktu	3 Laporan		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPPKB	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Laporan	3.325.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Laporan	3.325.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	3.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	3.200.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	25.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	27 Orang	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	27 Orang	0	
			Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala					Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala			
			Jumlah SKP ASN					Jumlah SKP ASN			

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPPKB	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	250 Surat	118.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPPKB	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	250 Surat	118.000.000	
			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	3 Pelayanan				Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	3 Pelayanan		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPPKB	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Kali	117.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPPKB	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Kali	117.500.000	
			Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan					Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	41.000.000	

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	60.500.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	60.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	16.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	16.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah objek aset yang dikelola	1470 Objek		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah objek aset yang dikelola	1470 Objek		
			Jumlah total nilai aset	Rp.13.504.559.240	25.000.000			Jumlah total nilai aset	Rp.13.504.559.240	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	DPPKB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	DPPKB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		Jumlah penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya		Jumlah penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	10.000.000	

	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DPPKB	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)	30%	563.600.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)	30%	563.600.000	
			Persentase indikator pengendalian kuantitas penduduk dengan kategori berhasil	100%			Persentase indikator pengendalian kuantitas penduduk dengan kategori berhasil	100%		
			Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	3.7 per1000			Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	3.7 per1000		
			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	85%			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	85%		
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DPPKB	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1 Perbup	426.400.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1 Perbup	426.400.000	
			Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	11 Kerjasama			Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	11 Kerjasama		
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 Dokumen	5.000.000	

	Tingkat Kabupaten/Kota		(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	44 Organisasi	0	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	44 Organisasi	0	

	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	44 Organisasi	0		Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	44 Organisasi	0	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	171.000.000		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	171.000.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	DPPKB	Jumlah kecamatan yang mengupdate data kependudukan tepat waktu.	17 Kecamatan	137.200.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	DPPKB	Jumlah kecamatan yang mengupdate data kependudukan tepat waktu.	17 Kecamatan	137.200.000	
	Pencatatan dan Perkumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	44.400.000		Pencatatan dan Perkumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	44.400.000	

	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	31.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	31.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DPPKB	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber KB	66.25%	2.869.167.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DPPKB	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber KB	66.25%	2.869.167.000	
			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66.25%				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66.25%		
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11.5%				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11.5%		
			Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang berkomitmen terhadap program KKBPK dan stunting	85%				Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang berkomitmen terhadap program KKBPK dan stunting	85%		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	84 kali	229.250.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	84 kali	229.250.000	
			Jumlah media promosi pengendalian penduduk dan KB yang dapat memberikan pemahaman	17 kali				Jumlah media promosi pengendalian penduduk dan KB yang dapat memberikan pemahaman	17 kali		

		kepada masyarakat					
		Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	352 orang				
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	55.000.000	Pengendalian Program KKBPK		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	35.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	0	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		

		pemahaman kepada masyarakat					
		Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	352 orang				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	55.000.000			
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	35.000.000			
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	0			

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	0	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	0
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	38.625.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	38.625.000
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	44 Organisasi	22.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	44 Organisasi	22.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdaya guna	23 Orang	255.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdaya guna	23 Orang	255.000.000

	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 Orang	0	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	20 Orang	0	
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	44 Organisasi	255.000.000	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	44 Organisasi	255.000.000	
	Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan	250 kali	2.287.417.000	Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan	250 kali	2.287.417.000	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	60 Faskes			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	60 Faskes		
		Jumlah Sarana penunjang yang diadakan untuk pelayanan KB dan sarana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	2 Unit			Jumlah Sarana penunjang yang diadakan untuk pelayanan KB dan sarana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	2 Unit		

	Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	33.300.000	Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	33.300.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1375 orang	7.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1375 orang	7.000.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	0	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	1.500.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	1.500.000.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	1 Laporan	0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	1 Laporan	0	

	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	22.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	22.000.000		
	Peningkatan Kesertaan KB Pria		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	14 Orang	5.000.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	14 Orang	5.000.000		
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 Orang	7.000.000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50 Orang	7.000.000		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	44 Organisasi	97.500.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	44 Organisasi	97.500.000		
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan serta dalam meningkatkan kualitas Pelayanan KB	3 organisasi				Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan serta dalam meningkatkan kualitas Pelayanan KB	3 organisasi			

Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	44 Organisasi	0	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	44 Organisasi	0
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	5.000.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	5.000.000
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	0	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	0
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	22 Kampung Kb	25.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	22 Kampung Kb	25.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Persentase kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKA yang dibina	90%	2.669.733.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	Persentase kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKA yang dibina	90%	2.669.733.000

	SEJAHTERA (KS)		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23.5 Tahun		SEJAHTER A (KS)		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23.5 Tahun		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi yang melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	99 Kelompok	164.133.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi yang melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	99 Kelompok	164.133.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPKB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Laporan	0	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPKB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Laporan	0	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	13.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	13.000.000	

	Akseptor (UPPKA))					Akseptor (UPPKA))					
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	143.133.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit	143.133.000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	DPPKB	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Peningkatan Pendapatan Keluarga/UPPKS) yang tersedia	1 Laporan	0	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	DPPKB	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Peningkatan Pendapatan Keluarga/UPPKS) yang tersedia	1 Laporan	0	

	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 orang	0	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 orang	0	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	DPPKB	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35 orang	0	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	35 orang	0	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang	68 Kelompok	0	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang	68 Kelompok	0	

	PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		mendapat biaya operasional kegiatan			BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		mendapat biaya operasional kegiatan			
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	68 Kelompok	0	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	68 Kelompok	0	

	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok tim pendamping keluarga yang berperan serta dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	261 Orang	2.505.600.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok tim pendamping keluarga yang berperan serta dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	261 Orang	2.505.600.000	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calor PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	DPPKB	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calor PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	261 Orang	1.722.600.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calor PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	DPPKB	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calor PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	261 Orang	1.722.600.000	
	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calor PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)		Jumlah kader Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calor PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	783 Orang	783.000.000	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calor PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)		Jumlah kader Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calor PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	783 Orang	783.000.000	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Namun dalam proses ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	Tidak ada	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	generasi Z) dan penyandang disabilitas		
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah " Birokrasi yang bersih dan

Akuntabel” dengan Indikator Tujuan ” Nilai Sakip Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB” dan ”Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk” dengan Indikator Tujuan ” Laju Pertumbuhan Penduduk”

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2026	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2026
Padang Pariaman Maju dan Sejahtera	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,55
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	59,2	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,34
					Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Presentase Kelompok Keluarga Tribina, UUPKS dan PIK-R yang Aktif	89,55

3.3 Program dan Kegiatan

- a.** Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyesuaian secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4),

memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti

pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun

secara strategis, efektif, dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
(Kepmendagri 050-3708)							Lokasi	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 2026	Sumber Dana	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.750.000.000	-		9.750.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TOTAL BELANJA			9.750.000.000			9.750.000.000
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		URUSAN	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	Kab. Padang Pariaman	100 %	3.647.500.000		100%	3.647.500.000

2	14	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen anggaran yang disiapkan	Kab. Padang Pariaman	100 %	48.000.000		100%	48.000.000
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	25.000.000	DAU	1 Dokumen	25.000.000
2	14	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD dan Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan yang disusun	Kab. Padang Pariaman	4 Laporan	20.000.000	DAU	4 Laporan	20.000.000
2	14	01	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Foru	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	3.000.000	DAU	1 Dokumen	3.000.000
2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Keuangan Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	100 %	3.325.000.000		100%	3.325.000.000
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan dalam 1 Tahun	Kab. Padang Pariaman	14 bulan	3.200.000.000	GAJI DAN TUNJANGAN	14 bulan	3.200.000.000
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan Bendahara yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	11 orang	100.000.000	HONOR PEGELOLA KEUANGAN	11 orang	100.000.000

2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Kab. Padang Pariaman	4 dokumen	25.000.000	DAU	4 dokumen	25.000.000
2	14	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	100 %	-		100%	-
2	14	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Padang Pariaman	4 orang	-	DAU	4 orang	-
2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Umum Kantor Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	92%	118.000.000		92%	118.000.000
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	36.000.000	DAU Belanja Modal	1 tahun	36.000.000
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan-bahan penunjang kebersihan Kantor	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	7.000.000	DAU	1 tahun	7.000.000
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	5.000.000	DAU	1 tahun	5.000.000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapatk Koordinasi Luar daerah dan dalam Daerah yang dilaksanakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	60.000.000	DAU	1 tahun	60.000.000

						Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat kantor yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	10.000.000	DAU	1 tahun	10.000.000
2	14	01	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Dokumen Administasi Umum Kantor Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	92%	14.000.000		92%	14.000.000
2	14	01	0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun		DAU	1 tahun	
2	14	01	0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Padang Pariaman	4 Unit	14.000.000	DAU Belanja Modal	4 Unit	14.000.000
2	14	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Dokumen Administasi Kantor Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	100 %	117.500.000		100%	117.500.000
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	41.000.000	DAU	1 tahun	41.000.000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	60.500.000	LISTRIK AIR	1 tahun	60.500.000
2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	16.000.000	DAU	1 tahun	16.000.000

2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Honorer yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	12 Orang		DAU	12 Orang	
2	14	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Aset Kantor Disiapkan	Kab. Padang Pariaman	100 %	25.000.000		100%	25.000.000
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Padang Pariaman	1 tahun	15.000.000	DAU	1 tahun	15.000.000
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor direhabilitasi sedang/berat	Kab. Padang Pariaman	1 Paket	10.000.000	DAU	1 Paket	10.000.000
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Padang Pariaman	2,34 %	563.600.000		2,34%	563.600.000
2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase dokumen kebijakan yang disusun	Kab. Padang Pariaman	60%	426.400.000		60%	426.400.000
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	5.000.000	DAU	1 Dokumen	5.000.000

2	14	02	2.01	34	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Kab. Padang Pariaman	20 Perangkat Daerah	5.000.000	DAU	20 Perangkat Daerah	5.000.000
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	-	DAU	1 Dokumen	-
2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	-	DAU	1 Dokumen	-

2	14	02	2.01	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Padang Pariaman	Organisasi	-	DAU	Organisasi	-
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Padang Pariaman	44 Organisasi	-	DAU	44 Organisasi	-
2	14	02	2.01	23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Padang Pariaman	2 Kegiatan	171.000.000	DAU DITENTUKAN	2 Kegiatan	171.000.000
					Gaji THL		Kab. Padang Pariaman	10 Orang	230.400.000	NON ASN DAU DITENTUKAN	10 Orang	230.400.000

					Jumlah orang dibayarkan Honorarium Tenaga Pramusaji	Kab. Padang Pariaman	2 Orang	-	NON ASN DAU DITENTU KAN	2 Orang	-
					Jumlah orang dibayarkan Honorarium Tenaga Pramubakti	Kab. Padang Pariaman	2 Orang	-	NON ASN DAU DITENTU KAN	2 Orang	-
					Jumlah orang dibayarkan Honorarium Tenaga Penjaga kantor	Kab. Padang Pariaman	3 orang	-	NON ASN DAU DITENTU KAN	3 orang	-
					Jumlah orang dibayarkan Honorarium Tenaga Pengolah Data	Kab. Padang Pariaman	2 Orang	-	NON ASN DAU DITENTU KAN	2 Orang	-
					Jumlah orang dibayarkan Honorarium Tenaga Kebersihan	Kab. Padang Pariaman	1 Orang	-	NON ASN DAU DITENTU KAN	1 Orang	-
					Jumlah orang dibayarkan Honorarium Tenaga Sopir Kepala Dinas	Kab. Padang Pariaman	?	-	NON ASN DAU DITENTU KAN	?	-
					Jumlah iuran jaminan Asuransi	Kab. Padang Pariaman		-	DAU JKK NON ASN		-
					Jumlah dukungan manajemen BOKB			-	DAK NON FISIK		-

2	14	02	2.01	27	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Padang Pariaman	1 Satuan Pendidikan	15.000.000	DAU DITENTUKAN	1 Satuan Pendidikan	15.000.000
2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun	Kab. Padang Pariaman	50%	137.200.000		50%	137.200.000
2	14	02	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Padang Pariaman	1 Laporan		DAK NON FISIK	1 Laporan	
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Perkumpulan Data Keluarga	Ferkuensi Registrasi dan Register Pelayanan KB di fasyankes Registrasi dan Register Pelayanan KB di fasyankes	Kab. Padang Pariaman	103 Nagari	44.400.000	DAK NON FISIK	103 Nagari	44.400.000
						Jumlah Laporan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Padang Pariaman	27 Faskes	61.800.000	DAK NON FISIK	27 Faskes	61.800.000

2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang dievaluasi tiap bulan yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	12 kali Evaluasi	31.000.000	DAU DITENTUKAN	12 kali Evaluasi	31.000.000
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Padang Pariaman	17 Balai Penyuluhan		DAK NON FISIK	17 Balai Penyuluhan	
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Padang Pariaman	17 kali		DAK NON FISIK	17 kali	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	Kab. Padang Pariaman	65,75 %	2.869.167.000		65,75 %	2.869.167.000
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Padang Pariaman	100 %	229.250.000		100%	229.250.000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen, program KB Nasional	Kab. Padang Pariaman	40 orang	55.000.000	DAU DITENTUKAN	40 orang	55.000.000

						Jumlah Laporan Kusus stunting yang tertangani	Kab. Padang Pariaman	1 kali	-	DAK NON FISIK	1 kali	-
						Jumlah Laporan Hasil pengendalian program KKBPK	Kab. Padang Pariaman	1 Laporan	-	DAK NON FISIK	1 Laporan	-
2	14	03	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Kencana	Jumlah Balai Penyuluhan KB Terpenuhinya biaya Operasional	Kab. Padang Pariaman	17 Balai Penyuluhan	35.000.000	DAU DITENTUKAN	17 Balai Penyuluhan	35.000.000
						Frekwensi Monitoring penyuluh KB	Kab. Padang Pariaman	17 Balai Penyuluhan	-	DAU DITENTUKAN	17 Balai Penyuluhan	-
						Peningkatan Kapasitas Kader Pengolah Data	Kab. Padang Pariaman	17 Balai Penyuluhan	-	DAU DITENTUKAN	17 Balai Penyuluhan	-
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Padang Pariaman	17 Balai Penyuluhan		DAK NON FISIK	17 Balai Penyuluhan	

						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Padang Pariaman	17 Balai Penyuluhan		DAK NON FISIK	17 Balai Penyuluhan	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Padang Pariaman	17 Balai Penyuluhan		DAK NON FISIK	17 Balai Penyuluhan	
2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Frekuensi Pelaksanaan Mini Lokakarya Kecamatan	Kab. Padang Pariaman	17 kali		DAK NON FISIK	17 kali	
						Jumlah laporan kegiatan konseling di balai penyuluhan	Kab. Padang Pariaman	17 kecamatan		DAK NON FISIK	17 kecamatan	
						Terlaksananya evaluasi Mini Lokakarya Kecamatan bersama TPK	Kab. Padang Pariaman	5 Buah	-	DAU DITENTUKAN	5 Buah	-

2	14	03	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana							
2	14	03	2.01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan KIE di tingkat desa/kelurahan	Kab. Padang Pariaman	103 Kali	38.625.000	DAK NON FISIK	103 Kali	38.625.000
						Jumlah Kelompok Kegiatan yang mengikuti kegiatan		170 kelompok	38.625.000	DAK NON FISIK	170 kelompok	38.625.000
2	14	03	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya koordinasi Tingkat Kab/Kota	Kab. Padang Pariaman	1 kali	22.000.000	DAU DITENTUKAN	1 kali	22.000.000
						Frekuensi koordinasi Tingkat Kab/Kota	Kab. Padang Pariaman	1 kali		DAK NON FISIK	1 kali	
						Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) tingkat kabupaten/kota	Kab. Padang Pariaman	1 kali	40.000.000	DAK NON FISIK	1 kali	40.000.000
2	14	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Pembinaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Padang Pariaman	100 %	255.000.000		100%	255.000.000
2	14	03	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah orang Temu Kader IMP KB Tk. Kab, Tk. Propinsi dan Tk. Nasional	Kab. Padang Pariaman	20 Orang	-	DAU DITENTUKAN	20 Orang	-

						Frekuensi Pelaksanaan KIE oleh Kader	Kab. Padang Pariaman	103 Nagari		DAK NON FISIK	103 Nagari	
2	14	03	2.02	5	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah orang petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) yang dibina	Kab. Padang Pariaman	34 orang	255.000.000	DAK NON FISIK	34 orang	255.000.000
2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB	Kab. Padang Pariaman	100 %	2.287.417.000		100%	2.287.417.000
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Padang Pariaman	27 Faskes	33.300.000	DAK NON FISIK	27 Faskes	33.300.000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor Pelayanan implan	Kab. Padang Pariaman	?	7.000.000	DAU DITENT UKAN	?	7.000.000
						Jumlah Akseptor IUD	Kab. Padang Pariaman	321 orang	98.700.000	DAK NON FISIK	321 orang	98.700.000
						Jumlah Akseptor Implan	Kab. Padang Pariaman	987 orang	471.000.000	DAK NON FISIK	987 orang	471.000.000
						Jumlah Akseptor MOW	Kab. Padang Pariaman	45 orang	107.240.000	DAK NON FISIK	45 orang	107.240.000

						Jumlah Akseptor MOP	Kab. Padang Pariaman	2 orang	1.577.000	DAK NON FISIK	2 orang	1.577.000
						Jumlah Akseptor Cabut Implan	Kab. Padang Pariaman	13 orang	34.600.000	DAK NON FISIK	13 orang	34.600.000
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Padang Pariaman	1 Dokumen	-	DAU DITENTUKAN	1 Dokumen	-
2	14	03	2	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Gudang Obat kontrasepsi KB beserta jaringannya yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan KB	Kab. Padang Pariaman	8 Balai Penyuluhan	1.500.000.000	DAK FISIK	8 Balai Penyuluhan	1.500.000.000
						Jumlah Operasional Pendamping DAK Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	Kab. Padang Pariaman	1 Tahun	-	DAU DITENTUKAN	1 Tahun	-
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah petugas faskes mendapatkan sosialisasi faskes terstandar (2 Tahapan)	Kab. Padang Pariaman	47 klinik	-	DAU DITENTUKAN	47 klinik	-

						Jumlah koordinasi pelayanan KB di faskes	Kab. Padang Pariaman	1 kali		DAK NON FISIK	1 kali	
						Jumlah pembinaan pelayanan KB di faskes	Kab. Padang Pariaman	27 Faskes		DAK NON FISIK	27 Faskes	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Padang Pariaman	1 Laporan	22.000.000	DAU DITENTUKAN	1 Laporan	22.000.000
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Kab. Padang Pariaman	14 Orang	5.000.000	DAU DITENTUKAN	14 Orang	5.000.000
2	14	03	2.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Padang Pariaman	50 Orang	7.000.000	DAU DITENTUKAN	50 Orang	7.000.000
2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Padang Pariaman	13%	97.500.000		13%	97.500.000
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Padang Pariaman	44 Organisasi		DAU DITENTUKAN	44 Organisasi	

2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Frekuensi Penguatan Lintas Sektor Program kampung KB	Kab. Padang Pariaman	1 Kali	5.000.000	DAU DITENTUKAN	1 Kali	5.000.000
						Frekuensi koordinasi lintas sektor Program Kampung KB	Kab. Padang Pariaman	1 Kali	-	DAK NON FISIK	1 Kali	-
2	14	03	2.04	05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Padang Pariaman	1 Unit	67.500.000	DAK NON FISIK	1 Unit	67.500.000
2	14	03	2.04	03	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Padang Pariaman	2 Kegiatan		DAU DITENTUKAN	2 Kegiatan	
2	14	03	2.04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Pokja kampung KB	Kab. Padang Pariaman	17 Kecamatan	25.000.000	DAU DITENTUKAN	17 Kecamatan	25.000.000
						Frekuensi Pembentukan dan Pengelolaan Kampung KB Baru	Kab. Padang Pariaman	33 kampung KB		DAU DITENTUKAN	33 kampung KB	
						Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Kelompok Ketahanan Keluarga dikampung KB	Kab. Padang Pariaman	17 kali		DAU DITENTUKAN	17 kali	
						Tersedianya Plang Rumah Data Kampung KB	Kab. Padang Pariaman	10 buah	-	DAU DITENTUKAN	10 buah	-
						Frekuensi Pelaksanaan kegiatan POKJA Kampung KB	Kab. Padang Pariaman	5 Kali	-	DAK NON FISIK	5 Kali	-

						Jumlah kelompok Kampung KB yang Dibina	Kab. Padang Pariaman	17kali		DAK NON FISIK	17kali	
						Jumlah kegiatan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Kab. Padang Pariaman	17kali	-	DAK NON FISIK	17kali	-
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (ASFR)	Kab. Padang Pariaman	12%	2.669.733.000		12%	2.669.733.000
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase kelompok Keluarga yang dibina	Kab. Padang Pariaman	72%	164.133.000		72%	164.133.000
2	14	04	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Padang Pariaman	4 Laporan	13.000.000	DAU	4 Laporan	13.000.000
2	14	04	2.01	x	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Padang Pariaman	400 orang	8.000.000	DAU	400 orang	8.000.000

2	14	04	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab. Padang Pariaman	25 Unit	143.133.000	DAK NON FISIK	25 Unit	143.133.000
2	14	04	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Padang Pariaman	50 orang	-	DAU	50 orang	-
2	14	04	2.01	21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kab. Padang Pariaman	4 Laporan	-	DAU	4 Laporan	-

2	14	04	2.01	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader mengunjungi Masyarakat dalam pembinaan Program KKBPK	Kab. Padang Pariaman	35 orang	-	DAU	35 orang	-
2	14	04	2.01	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kab. Padang Pariaman	68 Kelompok	-	DAU	68 Kelompok	-
2	14	04	2.01	28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kab. Padang Pariaman	68 Kelompok	-	DAU	68 Kelompok	-

2	14	04	2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Dan Kesejahteraan Keluarga		Kab. Padang Pariaman	100 %	2.505.600.000		100%	2.505.600.000
2	14	04	2	05	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Padang Pariaman	261 Orang	1.722.600.000	DAK NON FISIK	261 Orang	1.722.600.000
2	14	04	2	06	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kab. Padang Pariaman	783 Orang	783.000.000	DAK NON FISIK	783 Orang	783.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						25.554.500.000						25.554.500.000		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.554.500.000							25.554.500.000	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						25.554.500.000							25.554.500.000	
1	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	100% B 100%		100 Persen B Nilai	3.647.500.000						-	3.647.500.000	
	2	14	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sesuai aturan dan tepat waktu	-	3 3		3 Laporan	65.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Masyarakat Kabupaten Padangpariaman	-	65.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

														asi Milenial dan Genera si Z), dan Penyan dan Disabili tas						
	2	1 4	0 1	2. 0 6		Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	-	3		3 pelayan an 250 Surat	118.000.000			Mempe rkuat Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a (SDM), Sains, Teknol ogi, Pendid kan, Keseha tan, Prestas i Olahra ga, Keseta raan Gender , serta Pengu atan Peran Perem puan, Pemud a (Gener asi Milenial dan	Meningk atkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpeng etahuan, terampil dan berdaya saing 4. Peningk atan Sumber Daya Manusia yang Berkualit as dan Berdaya Saing dan Berketa hanan Sosial	Masy araka t Kabu paten Pada ng paria man	-	118.000.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

														asi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang dan Disabilitas						
	2	1 4	0 1	2. 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	-			150000 000 rupiah	150.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing dan Berketahanan Sosial	Masyarakat Kabupaten Padangpariaman	-	150.000.000,00	

[illegible]

														asi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas						
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	-			12 kali 12 Kali	148.500.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdayasaing 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing dan Berketahanan Sosial	Masyarakat Kabupaten Padangpariaman	-	148.500.000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

														asi Milenial dan Generasi Z), dan Penyangga dan Disabilitas						
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola Jumlah total nilai aset	-			1470 OBJEK 13.504.559.240 Rupiah	25.000.000		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing dan Berketahanan Sosial	Masyarakat Kabupaten Padangpariaman	-	25.000.000		

[illegible]

[illegible]

														asi Milenial dan Generasi Z), dan Penyan dan Disabili tas							
2	2	14	02			PROGRA M PENGENDALIAN PENDUD UK	-	-			-	563.600.000						-	563.600.000		
	2	14	02	2.01		Pemadua n dan Sinkronisa si Kebijakan Pemerinta h Daerah Provinsi dengan Pemerinta h Daerah Kabupate n/Kota dalam rangka Pengendal ian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peratura n Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Jumlah kerjasama penyelenggaraa n pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	0		1 Perbup 11 Kerjasa ma	426.400.000			Mempe rkuat Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a (SDM), Sains, Teknol ogi, Pendidid kan, Keseha tan, Prestas i Olahra ga, Keseta raan Gender , serta Pengu atan Peran Perempuan.	Meningk atkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpeng etahuan, terampil dan berdaya saing 4. Peningk atan Sumber Daya Manusia yang Berkualit as dan Berdaya Saing dan Berketa hanan Sosial	Masy araka t Kabu paten Pada ng paria man	-	426.400.000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

														asi Milenial dan Genera si Z), dan Penyan dan Disabili tas					
	2	1 4	0 2	2. 0 2		Pemetaan Perkiraan Pengendal ian Penduduk Cakupan Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah kecamatan yang mengupdate data kependudukan tepat waktu.	-	17		17 Kecama tan	137.200.000		Mempe rkuat Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a (SDM), Sains, Teknol ogi, Pendidi kan, Keseha tan, Prestas i Olahra ga, Keseta raan Gender , serta Pengu atan Peran Perem puan, Pemud a (Gener asi Milenial dan	Meningk atkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpeng etahuan, terampil dan berdaya saing 4. Peningk atan Sumber Daya Manusia yang Berkualit as dan Berdaya Saing dan Berketa hanan Sosial	Masy araka t Kabu paten Pada ng paria man	-	137.200.000	

[illegible]

[illegible]

															asi Milenial dan Generasi Z), dan Penyan dan Disabilitas					
3	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	15,54 65,91		11.25 Persen 66.50 Persen	2.869.167.000						-	2.869.167.000	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) Jumlah media promosi pengendalian penduduk dan KB yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai	-	348 17 80		352 Orang 17 Kali 84 Kali	229.250.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Masyarakat Kabupaten Pangparan	-	229.250.000	

						Kearifan Budaya Lokal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

														asi Milenial dan Generasi Z), dan Penyangga dan Disabilitas					
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdaya guna	-	23		23 orang	255.000.000		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing dan Berketahanan Sosial	Masyarakat Kabupaten Padangpariaman	-	255.000.000	

[illegible]

[illegible]

														asi Milenial dan Genera si Z), dan Penyan dan Disabili tas						
	2	1 4	0 3	2. 0 3		Pengend ian dan Pendistrib usian Kebutuha n Alat dan Obat Kontrasep si serta Pelaksana an Pelayanan KB di Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP Jumlah Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Sarana penunjang yang diadakan untuk pelayanan KB dan sarana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	-	60		60 faskes 250 kali 2 unit	2.287.417.000			Mempe rkuat Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a (SDM), Sains, Teknol ogi, Pendidi kan, Keseha tan, Prestas i Olahra ga, Keseta raan Gender , serta Pengu atan Peran Perem puan, Pemud a (Gener asi Milenial dan	Meningk atkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpeng etahuan, terampil dan berdaya saing 4. Peningk atan Sumber Daya Manusia yang Berkualit as dan Berdaya Saing dan Berketa hanan Sosial	Masy araka t Kabu paten Pada ng paria man	-	2.287.417.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

														asi Milenial dan Genera si Z), dan Penyan dan Disabili tas						
	2	1 4	0 3	2. 0 4		Pemberda yaan dan Peningkat an Peran Serta Organisasi Kemasyar akatan Tingkat Daerah Kabupate n/Kota dalam Pelaksana an Pelayanan dan Pembinaa n Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan serta dalam meningkatkan kualitas Pelayanan KB Jumlah stakeholders/pe mangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	-	4		3 Organis asi 44 Organis asi	97.500.000			Mempe rkuat Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a (SDM), Sains, Teknol ogi, Pendidi kan, Keseha tan, Prestas i Olahra ga, Keseta raan Gender , serta Pengu atan Peran Perem puan, Pemud a (Gener asi Milenial dan	Meningk atkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpeng etahuan, terampil dan berdaya saing 4. Peningk atan Sumber Daya Manusia yang Berkualit as dan Berdaya Saing dan Berketa hanan Sosial	Masy araka t Kabu paten Pada ng paria man	-	97.500.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

															asi Milenial dan Generasi Z), dan Penyan dan Disabilitas						
4	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun Persentase kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKA yang dibina	-	87	24 Tahun 90 Persen	2.669.733.000						-	2.669.733.000			
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi yang melaksanakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	96	99 Kelompok	164.133.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdayasaing 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Masyarakat Kabupaten Pangerman	-	164.133.000			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

														asi Milenial dan Genera si Z), dan Penyan dan Disabili tas						
	2	1 4	0 4	2. 0 2		Pelaksana an dan Peningkat an Peran Serta Organisasi Kemasyar akatan Tingkat Daerah Kabupate n/ Kota dalam Pembang unan Keluarga Melalui Pembinaa n Ketahana n dan Kesejahter aan Keluarga	Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	261		80 Persen	1.644.300.000, 00			Memper kuat Pemban gungan Sumber r Daya Manusi a (SDM), Sains, Teknol ogi, Pendidik an, Keseha tan, Prestasi Olahra ga, Keseta raan Gender , serta Pengu atan Peran Perem puan, Pemuda (Gener asi	Meningk atkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpeng etahuan, terampil dan berdaya saing 4. Peningk atan Sumber Daya Manusia yang Berkualit as dan Berdaya Saing dan Berketa hanan Sosial	Masy araka t Kabup aten Pada ng paria man	-	1.644.300.000,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Dinas perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Dinas harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Dinas dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Dinas ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dinas diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Dinas menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pariaman , 17 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Drs. H. AZWARMAN, MM
NIP. 196706041992031006